

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN
METODE *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH
KOTA MEDAN PERIODE 2019-2023**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak.)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : VIONA ASMARA
NPM : 1905170078
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



JMSU
Jember | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : VIONA ASMARA
NPM : 1905170078
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN PERIODE 2019-2023

Dinyatakan : (A-), *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Iva Ubara Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA)

Penguji II

(M. Firza Alpi, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Rezki Zurriah, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : VIONA ASMARA
N.P.M : 1905170078
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN
METODE *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH
KOTA MEDAN PERIODE 2019-2023

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Februari 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Doc. Prof. Dr. H. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Viona Asmara
NPM : 1905170078
Dosen Pembimbing : Rezki Zurriah, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	-Format penulisan disesuaikan dan pedoman -Latar belakang diperbaiki, date / masalah Penelitian ditambal -Rumusan, batasan masalah disesuaikan	3 Okt '24 6 Nov '24	
Bab 2	-Teorinya disesuaikan -kerangka konseptual disesuaikan lagi -penelitian terdahulu ditambahkan (jurnal)	9 Okt '24 7 Nov '24	
Bab 3	-Format penulisan diperbaiki lagi -Def. Operasional di perbaiki -tabel dan waktu penelitian di sesuaikan -Tdk. pengumpulan dan analisis di perbaiki	6 Nov '24 11 Nov '24 15 Nov '24	
Bab 4	- Deskripsi Data ditambahkan - Analisis Data di perbaiki - pembahasan di sesuaikan, tambahkan analisisnya dikaitkan dg teorinya	16 Jan '25 21 Jan '25 10 Feb '25	
Bab 5	- Kesimpulan di sesuaikan - Survei di perbaiki	10 Feb '25	
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka disesuaikan - Daftar pustaka pakai mendelay	16 Jan '25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Bimbingan Tugas Akhir selesai, ACC !!!	14 Feb '25	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, Februari 2025

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Rezki Zurriah, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Viona Asmara
N.P.M : 1905170078
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul **“Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Viona Asmara

ABSTRAK

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN PERIODE 2019-2023

Viona Asmara
Program Studi Akuntansi
Email: vionaasmara45@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur kinerja dari Pemerintah Kota Medan periode 2019-2023 ditinjau berdasarkan konsep value for money, yaitu menggunakan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan dari dokumentasi kemudian disesuaikan dengan indikator Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian terhadap kinerja keuangan. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif.

Penelitian ini berangkat dari adanya program yang tidak terlaksana dengan baik pada saat pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan perannya menjadi pemerintah daerah. Yang mana pada saat pembuatan lampu penerangan jalan yang mengalami kegagalan dan mengakibatkan Pemerintah Kota Medan mengalami kerugian sebesar 25,7 miliar dan juga kegagalan yang terjadi pada saat menjalankan proyek perbaikan jalan yang juga membuat Pemerintah Kota Medan mengalami kerugian sebesar 1,7 miliar.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Kota Medan selama periode 2019–2023 memiliki rasio ekonomis berada pada kategori kurang ekonomis dengan tingkat ekonomis rata-rata 78,482%, rasio efisiensi berada pada kategori kurang efisiensi dengan tingkat efisiensi rata-rata 99,85% dan rasio efektivitas berada pada kategori cukup efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata 85,82%.

Kata Kunci: Pengukuran kinerja, *value for money*, rasio ekonomis, rasio efisiensi, rasio efektivitas

ABSTRACT

PERMORMANCE MEASUREMENT ANALYSIS USING VALUE FOR MONEY METHOD AT THE MEDAN CITY GOVERNMENT PERIOD 2019-2023

Viona Asmara
Accounting Study Program
Email: vionaasmara45@gmail.com

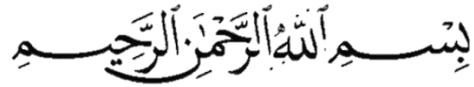
This research seeks to evaluate and assess the effectiveness of the Medan City Government during the period from 2019 to 2023, focusing on the value for money framework, which emphasizes ratios of economy, efficiency, and effectiveness. The approach employed in this research is descriptive, utilizing qualitative data derived from the Medan City Government's Budget Realization Report for the years 2019 to 2023. The technique for gathering data in this study is founded on documentation, which is then aligned with the criteria set by Kepmendagri No. 690.900.327 from 1996 that pertains to the evaluation of financial performance. For the analysis of the data, this study applies descriptive analytical methods.

This research stems from the recognition of a program that was inadequately executed during the infrastructure projects undertaken by the Government of Medan City in fulfilling its responsibilities as a local authority. During the installation of street lighting, there was a lack of success that led to the Medan City Government incurring a financial setback of 25.7 billion, in addition to the setbacks encountered during the road repair initiative, which also resulted in a loss of 1.7 billion for the Medan City Government.

The findings of this research show that the Medan City Government has an economic ratio classified as very economical for the years 2019 to 2023, with a mean less economic level of 78,48%. The efficiency ratio falls into the inefficient category, reflecting an average less efficiency level of 99,85%. Additionally, the effectiveness ratio is positioned in the fairly effective category, showing an average effectiveness level of 85,82%.

Keywords: *Performance measurement, value for money, economic ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal ini dapat dibuat dan dikerjakan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang direncanakan dan dapat terselesaikan tepat dengan waktunya. Tak lupa pula shalawat bertangkaikan salam berbuah rindu dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan yang melimpah.

Adapun penyusunan proposal ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berjudul “**Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023**”.

Dalam menyusun proposal ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena banyaknya keterbatasan dalam pengetahuan, pengalaman dan buku serta sumber informasi yang relevan. Namun dengan adanya bantuan dan motivasi dari Dosen, Keluarga dan juga teman-teman seperjuangan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini semaksimalnya. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu yang istimewa yaitu kedua Orangtua yang paling saya cintai yaitu **Ayahanda Yan Asmara** dan **Ibunda Evi Susianti** yang telah memberikan dukungan baik

dukungan moril, materil, maupun spiritual sehingga saya dapat berada di posisi sekarang ini. Kemudian diantaranya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.SI.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.S.i** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Rezki Zurriah, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak kritik, saran, arahan dan masukan selama proses pembuatan proposal ini.
8. **Pemerintah kota medan**, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
9. Terkhusus kepada **Viona Asmara**, diri saya sendiri yang telah berjuang, dirundung lika-liku badai keadaan, berpacu dengan waktu dan memutuskan untuk tetap konsisten agar menuntaskan segala kewajiban dan keputusan yang telah dibuat.

10. Yang tersayang teman-teman **seperjuangan** saya Asmah Nurur Rizki, Yora Sinaga, Rekka Rapiyana, Dan Novia Wulan Sari.
11. Yang tersayang seluruh **Basecamp**: Azmy, Iwana, Isra, Nisa dan Lisda.
12. Seluruh **Keluarga Besar IMM FEB UMSU** dan kader stambuk 2019.
13. Seluruh teman-teman penulis dari **kelas B Akuntansi Pagi** stambuk 2019.
14. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis adalah seorang manusia yang menghamba kepada sang Pencipta yang maha sempurna, manusia yang tak luput dari khilaf dan salah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga proposal ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Februari 2025
Penulis

Viona Asmara
NPM. 1905170078

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1. Pengukuran Kinerja	
2.1.1.1 Pengertian Pengukuran Kinerja	12
2.1.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja.....	13
2.1.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja.....	13
2.1.1.4 Konsep Pengukuran Kinerja	14
2.1.1.5 Indikator Pengukuran Kinerja	15
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	16
2.1.3 Laporan Keuangan Sektor Publik	18
2.1.3.1 Pengertian dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik	18
2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik.....	19
2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik	20
2.1.4 <i>Value for Money</i>	24
2.1.4.1 Pengertian <i>Value for Money</i>	24
2.1.4.2 Indikator <i>Value for Money</i>	25
2.2 Penelitian Terdahulu	29

2.3 Kerangka Berfikir Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Definisi Operasional	33
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.4. Sumber Data.....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Deskripsi Data.....	39
4.2 Pembahasan.....	40
4.2.1. Analisis Data	40
4.2.2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan berdasarkan Metode Value For Money	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
5.3 Keterbatasan Masalah	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Table.1.1	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023	6
Table.1.2	<i>Value For Money</i>	7
Table.1.3	Kriteria Penilaian Ekonomis <i>Value For Money</i>	7
Table.1.4	Kriteria Penilaian Efisiensi Metode <i>Value For Money</i>	8
Table.1.5.	Kriteria Penilaian Efektivitas Metode <i>Value For Money</i>	8
Table.2.1	Kriteria Penilaian Ekonomis <i>Value For Money</i>	26
Table 2.2	Kriteria Penilaian Efisiensi Metode <i>Value For Money</i>	27
Table 2.3	Kriteria Penilaian Efektivitas Metode <i>Value For Money</i>	29
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1.	Definisi Operasional.....	35
Tabel 3.2	Skedul Rencana Penelitian	36
Table 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023	41
Table 4.2	Rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan	43
Table 4.3	Rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan	44
Table 4.4	Rasio efektivitas Pemerintah Kota Medan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Value For Money	28
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam membangun dan mengelola daerah dengan baik.

Organisasi Sektor publik merupakan satuan kerja perangkat daerah yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pelaksanaan utama dari tujuan organisasinya yaitu tidak mencari keuntungan keuangan. Jadi organisasi tersebut umumnya dimiliki secara kolektif secara publik dan kepemilikan atas sumber dayanya tidak dicerminkan dalam bentuk saham yang dapat diperjual belikan (Purnama Warsani sari, 2022).

Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-lembaga negara atau pemerintah atau organisasi yang memiliki keterikatan dengan keuangan negara. Disisi lain publik sendiri juga dapat diartikan sebagai masyarakat, yaitu

pihak yang mempunyai kepemilikan atas organisasi sektor publik tersebut dan pihak yang berhak mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik tersebut (Nurmala, 2015).

Dengan adanya hak otonomi daerah membuat pemerintah daerah dapat menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini mempertegas kebutuhan atas pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. Dan di akhir periode kepemimpinan, pemerintah daerah akan melakukan laporan pertanggung jawaban atas APBD selama satu periode sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Dimana proses dalam laporan keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) (Hafsah, 2018).

Sebagai bagian dari masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah daerah, kita dapat mengukur dan melihat seberapa besar tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap pemerintah.

Menurut Ulum (2012) Pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja penting dilakukans sebagai salah satu bentuk evaluasi bagi pemerintah daerah maupun satuan kerja guna peningkatan pelayanan publik, kinerja maupun akuntabilitasnya, hal ini juga sesuai dengan penilaian yang

disampaikan oleh (Mardiasmo, 2018) yang menegaskan bahwasanya pengukuran kinerja berfungsi untuk mengukur serta memberi penilaian terhadap prestasi manajer serta unit-unit organisasi yang berada dibawah naungannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pada prinsip anggaran atau yang biasa kita sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran dari kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi kebijakan penerimaan pemerintah daerah serta realisasi anggaran tahun yang lalu (Zulia Hanum 2011). Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda (Sinambela Elizar, 2016). Hal ini diperlukan untuk memastikan tercapainya pengeluaran yang tidak melebihi anggaran dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai sasaran. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkatan pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh Instansi Pemerintahan.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diukur menggunakan konsep *value for money*. Menurut Karina & Ramadhani (2022) kriteria utama yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dalam pengukuran *Value for Money* adalah ekonomi, efisiensi,

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *Value For Money* didukung dengan adanya grand teori Donalson et al (1991) Teori Agensi dan stewardship theory, pemerintah sebagai *Principal* yang punya kewenangan, kemudian kepala balai sebagai *agent* sebagai pengguna anggaran. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk semakin cerdas dan berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga lembaga sektor publik (Sari & Nindi 2014).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Saragih Fitriani, Elizsar Sinambela, 2018)

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo 2016). Ekonomi adalah suatu metode untuk mengurangi pengeluaran sekaligus meningkatkan input dan pendapatan melalui berbagai kegiatan yang berkelanjutan (Mahmudi, 2016). Salah satu pendekatan untuk mengevaluasi dampak ekonomi suatu kegiatan adalah dengan membandingkan jumlah anggaran aktual dengan anggaran yang dimaksudkan.

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa membandingkan harga aktual dengan biaya standar merupakan salah satu cara untuk mengetahui efisiensi. Sementara itu, Mardiasmo (2016) membandingkan output yang diharapkan dengan input merupakan suatu metode dalam pengukuran efisiensi. Karena efisiensi didefinisikan sebagai rasio input terhadap output, maka dapat dikatakan bahwa keuangan daerah telah dikelola dengan baik oleh pemerintah, apabila nilai rasio perhitungannya semakin menurun. Mahmudi (2016) penjelasan tentang keterkaitan antara produksi dan tujuan adalah apa yang dimaksud dengan efektivitas. Suatu organisasi akan lebih efektif apabila output-nya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuannya.

Dalam menjalankan perannya sebagai pemerintah daerah, Pemerintah kota Medan terlibat langsung dalam perencanaan, pengendalian, dan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui. Oleh sebab itu pemerintah kota Medan harus memberikan usaha yang terbaik agar APBD yang direncanakan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan juga akuntabilitas yang disertai pengawasan oleh lembaga terkait dan masyarakat.

Selama menjabat sebagai walikota kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution memiliki program pembangunan infrastruktur pelayanan dasar pemerintah daerah. Beberapa diantaranya yaitu pembangunan dan rehabilitasi jembatan, revitalisasi lapangan merdeka, pembangunan islamic center, peningkatarn infrastruktur penerangan jalan umum, dan perbaikan jalan.(Leandha, 2022)

Namun tidak semua program berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2023

walikota kota Medan menegaskan bahwa proyek lampu jalan yang akrab disebut lampu “pocong” di tahun 2022 total senilai Rp.25,7 M dianggap sebagai proyek gagal. Pihaknya menyebutkan kegagalan ini diduga ada kelalaian dalam perencanaan, sehingga proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan sekitar 1.700 unit tidak sesuai perencanaan awal (Said, 2023). Selain itu, terdapat perbaikan jalan yang juga mengalami kegagalan lantaran miskomunikasi antar lembaga terkait sehingga membuat beberapa pengendara motor tergelincir di jalan Sudirman karena pergantian aspal dengan bahan yang bermotif mirip keramik. Proyek perbaikan jalan tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 1, 7 miliar. Dari kedua fenomena yang terjadi, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa program yang menjadikan alokasi dari APBD kota Medan belum ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sehingga mengalami kerugian dan menimbulkan banyak dampak negatif (Leandha, 2022). Berikut data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dari tahun 2019-2023

Table 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2019	6.302.963.592.428	5.059.387.661.308	80,26%	6.257.239.035.331	5.518.722.179.306
2020	5.254.667.074.399,53	3.854.742.410.736,56	73,35%	4.757.852.448.866,16	3.988.761.485.152,01
2021	5.731.395.062.275	4.499.145.144.311,87	78,50%	5.208.964.175.119	5.023.080.346.608,29
2022	7.668.720.191.488	6.047.219.172.842	78,86%	6.522.123.770.774	5.449.340.586.722,85
2023	7.844.702.182.572	6.282.441.543.317	80,08%	7.296.157.352.009	5.802.580.478.749,50

Sumber: LRA Pemerintah Kota Medan setelah diolah

Pada table1.1 diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada pemerintah kota Medan tidak cukup baik pada tahun 2020 dimana hanya digunakan sebesar 73,35%. Namun jika dilihat dari sudut pandang *Value for*

Money sebagai alat untuk mengukur kinerja fenomena tersebut, dapat dikatakan kurang ekonomis, kurang efisiensi dan kurang efektivitas.

Berikut merupakan hasil perhitungan dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan yang sudah menggunakan Metode Value For Money:

Table.1.2
Value For Money

Tahun	Ekonomis	Efisiensi	Efektivitas
2019	80,27%	91,68%	88,20%
2020	73,36%	96,64%	83,84%
2021	78,50%	89,57%	96,43%
2022	78,86%	110,97%	83,55%
2023	80,09%	108,27%	79,53%

Adapun tiga kriteria yang ditentukan oleh Kepmendagri dalam penggunaan metode *Valu For Money* yaitu : Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas sebagai berikut:

Table.1.3
Kriteria Ekonomis Value For Money

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
Kurang Dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Dari data Laporan Realisasi Anggaran diatas juga dapat diketahui bahwa pemerintah kota medan menghasilkan data anggaran yang kurang ekonomis pada tahun 2020,2021, dan 2022 karena hasil rasionya berada dibawah 80%.

Table 1.4
Kriteria Penilaian Efisiensi Metode Value For Money

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Tidak Efisiensi
90% - 100%	Kurang Efisiensi
80% - 90%	Cukup Efisiensi
60% - 80%	Efisiensi
Kurang Dari 60%	Sangat Efisiensi

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Dari data Laporan Realisasi Anggaran dapat di temukan pendapatan Pemerintah Kota Medan pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 91,68% dan 96,64% yang mana di kategorikan Kurang Efisiensi. Pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 110,97% dan 118,27% yang mana di kategorikan Tidak efisiensi.

Teble 1.5
Kriteria Penilaian Efektivitas Metode Value For Money

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Efektivitas
90% - 100%	Efektivitas
80% - 90%	Cukup Efektivitas
60% - 80%	Kurang Efektivitas
Kurang Dari 60%	Tidak Efektivitas

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Dari data Laporan Realisasi Anggaran diatas juga dapat diketahui bahwa pemerintah kota medan menghasilkan pendapatan yang kurang efektif pada tahun 2023 sebesar 79,53%.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta fenomena diatas menjadikan penulis tertarik untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode *Value For Money*. Berdasarkan itu penulis menetapkan judul penelitian yaitu "**Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value for Money* Pada Pemerintah Kota Medan Periode 2019 - 2023**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Adanya beberapa kegagalan pada program pembangunan infrastruktur pemerintah kota Medan yang menimbulkan kerugian terhadap APBD kota Medan
2. Menurunnya penyerapan anggaran menggunakan *Value For Money* pada Pemerintah Kota Medan sebagai penggunaan anggaran
3. Penurunan tingkat realisasi belanja pada Pemerintah Kota Medan pada tahun 2020.

Dalam penelitian ini, sangat penting untuk membatasi penelitian. Maka penelitian yang dilakukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dibatasi hanya menggunakan 3 kriteria yaitu: Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas pada rasio *Value For Money*.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, sangat penting untuk membatasi penelitian. Maka penelitian yang dilakukan kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan dibatasi hanya menggunakan 3 kriteria yaitu: Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas, pada rasio *Value For Money*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Medan diukur dengan menggunakan Value for Money?

2. Bagaimana tingkat ekonomis program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana tingkat efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan?
4. Bagaimana tingkat efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan?

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan *Value For Money*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat ekonomis program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.7 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai analisis pengukuran kinerja menggunakan metode *value for money*

2. Bagi Akademis

Diharapkan untuk dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan pengukuran kinerja menggunakan metode *value for money*.

3. Bagi Pemerintahan dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang strategis dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tata kelola yang lebih baik dan profesional dalam pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengukuran Kinerja

2.1.1.1 Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang digunakan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian melalui tolak ukur kinerja (Halim, A & Kusufi 2017). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input; alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, meningkatkan kesadaran akan uang publik (*Public Costs Awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo 2021). Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja organisasi, termasuk pengukuran atas Produktivitas, Efektivitas, Kualitas dan Ketepatan waktu (Andi 2022).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap organisasi sektor publik untuk mengukur pencapaian pelaksanaan yang nantinya dapat dijadikan acuan pencapaian pada periode berikutnya dan juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dalam periode berjalan.

2.1.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Majid (2019), standar untuk mengevaluasi keuangan negara telah lahir di bidang pemeriksaan sektor publik. Pemeriksaan sektor publik sangat penting untuk mencapai akuntabilitas publik. Sektor publik, khususnya pemerintah, Ada tiga macam pemeriksaan, khususnya pemeriksaan pembukuan, pemeriksaan pelaksanaan, dan pemeriksaan yang memiliki alasan tertentu. Sedangkan, menurut Halim, A& Kusufi (2017) pengukuran kinerja digunakan untuk membantu manajer publik dalam menilai capaian melalui tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya pengukuran kinerja, maka kita bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya. Selain itu, kita juga bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif (Novi Fadhila 2022).

Menurut Mardiasmo (2009) Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik di lakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- c. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2009) menyatakan manfaat pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang ukuran yang untuk penilaian kinerja manajemen.
2. Memberikan arahan untuk sesuai rencana yang dituangkan.

3. Pantau, awasi pencapaian kinerja, dan bandingkan dengan tujuan kinerja, dan ambil tindakan kolektif untuk meningkatkan kinerja.
4. Penghargaan dan hukuman.
5. Alat komunikasi *bottom-up* dengan atasan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
6. Membantu menentukan apakah akan memenuhi kepuasan pelanggan.
7. Membantu memahami rencana kebijakan lembaga pemerintah.
8. Pastikan pengambilan keputusan yang mendalam dan obyektif.

Menurut Mahsun (2016) manfaat pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan efektivitas pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan yang diberikan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Biaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi murah karena menghilangkan setiap inefisiensi yang ada dan menghemat pemakaian sumber daya.
4. Peruntukan belanja lebih mengarah kepada kepentingan publik.
5. Meningkatkan *cost awareness* sebagai awal akuntabilitas publik.

2.1.1.4 Konsep Pengukuran Kinerja

Menurut Wibowo (2010) kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia (Pemerintah, n.d.) yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja. Permendagri No.38 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau

hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

2.1.1.5 Indikator Pengukuran Kinerja

Indikator pengukuran kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*), dimana Bastian & Indra (2006) menjelaskan :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Apa yang diungkapkan Indra Bastian diatas, sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) bahwa, “istilah indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja”. Yang mana, adapun peran indikator kinerja bagi pemerintah yaitu:

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan.
3. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial.
3. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan.
4. Untuk menunjukkan standar kinerja.
5. Untuk menunjukkan efektivitas.
6. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran.
7. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Mahsun, 2016).

Struktur APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 terdiri dari 3 bagian sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah

Penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2) Belanja Daerah

Belanja daerah adalah penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau deplesi aset atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana.

3) Pembiayaan adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus.

Menurut Pasal 16 Permendagri No. 13/2006, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan anggaran

- 5) Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Prinsip Penyusunan APBD antara lain:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.1.3. Laporan Keuangan Sektor Publik

2.1.3.1. Pengertian dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengomunikasian informasi yang bermaksud untuk pembuatan keputusan dan menilai kinerja organisasi (Sudaryono, 2016). Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Arus

Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan non-finansial (Mardiasmo 2009:160).

Menurut Sudaryono (2016) secara umum fungsi laporan keuangan pemerintah adalah:

- 1) Kepatuhan dan pengelolaan
- 2) Perencanaan dan informasi otorisasi
- 3) Kelangsungan organisasi
- 4) Hubungan masyarakat
- 5) Sumber fakta dan gambaran

2.1.3.2. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Adapun tujuan dari penyusunan sebuah laporan keuangan pada suatu organisasi sektor publik ialah untuk :

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya finansial.
- 2) Meyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratannya.
- 3) Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
- 4) Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan di dalamnya.
- 5) Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian & Indra, 2006).

2.1.3.3. Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Neraca

Menurut Peraturan Pemerintah No.27 (2014) neraca merupakan salah satu komponen yang ada dalam laporan keuangan pemerintah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek
- h. Kewajiban jangka panjang
- i. Ekuitas dana

2. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PSAP No 02 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode PSAP No 02 PP No 71 (2010)

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar Faud (2016).

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus atau defisit
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto; dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA PSAP No 02 PP No 71 Tahun 2010)

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran Faud (2016).

Menurut PSAP No 03 Laporan Arus Kas menyajikan menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran (PSAP N0 03 PP No 71 Tahun, 2010)

Entitas pelaporan pemerintah pusat/ daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut :

- a) Menyediakan informasi yang telah baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang.
- b) Lebih mudah dipahami oleh penggunaan laporan.
- c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi (PSAP, No 03 PP No 71 Tahun 2010)

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAP No 04 setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum (PSAP No 04 PP No 71 Tahun 2010).

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahan di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahan, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan (PSAP No 04 PP No 71 Tahun 2010).

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dengan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya (PSAP No 04 PP No 71 Tahun 2010.)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan ekono mo makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaina target.
- b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan satandar akuntansi pemerintahan yang belu sajikan alam lembar muka laporan keuangan.
- e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja an rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan (PSAP No 04 PP No 71 Tahun 2010).

2.1.4. Value For Money

2.1.4.1. Pengertian Value For Money

Value For Money menurut Mardiasmo (2009) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Mahmudi (2016) *value for money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang.

Dalam akuntansi dan manajemen keuangan, konsep *value for money* berbeda dengan konsep *time value of money*. *Value for money* adalah penghargaan terhadap nilai uang, sedangkan *time value* adalah nilai yang dapat berubah karena perubahan waktu (Dila Wandasari & Aqwa Naser Daulay 2023).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama, dan merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada lima elemen, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*).

- a. Ekonomis merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.
- b. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- c. Efektivitas meningkatkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.
- d. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.
- e. Kesetaraan, perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata (M. Mahsun, 2016).

2.1.4.2. Indikator *Value For Money*

Menurut Bastian & Indra (2006) Menyatakan Bahwa Indikator *Value For Money* adalah:

1. Ekonomis
2. Efisiensi
3. Efektivitas

Adapun penjelasan lebih lanjut dari indikator diatas ialah sebagai berikut:

1. Ekonomis

Menkes (2017) menyatakan bahwa ekonomi adalah melakukan kehematan dengan menggunakan sesuatu secara berhati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang terbaik. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa ekonomi merupakan

hubungan antara pasar dan masukan atau praktik membeli barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada kemungkinan harga yang terbaik (*spending less*). M. Mahsun (2016) yang menyatakan bahwa ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat kehematan atas pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik.

Dari penjelasan yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ekonomis merupakan suatu alat ukur dalam sebuah organisasi sektor publik yang digunakan untuk meminimalisir pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik agar tidak mengalami pengeluaran yang berlebih.

Indikator Rasio Ekonomis

Pengukuran rasio ekonomi memahami bahwa dalam mendapatkan kualitas dan kuantitas tertentu dari sumber daya (input) lebih baik jika dengan harga yang lebih murah atau harga yang mendekati harga pasar.

Ekonomi merupakan ukuran relatif yang dalam pengukurannya hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Rumus untuk menghitung tingkat ekonomi menurut M. Mahsun (2016) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Ekonomi = \frac{Realisasi\ Biaya}{Anggaran\ Biaya} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengetahui seberapa tingkat ekonomis dari hasil perhitungan, maka dapat menggunakan indikator pengukuran ekonomis.

Table.2.1
Kriteria Ekonomis Value For Money

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
Kurang Dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun1996

2. Efisiensi

Memaksimalkan output dengan input tertentu adalah sebuah pencapaian. Meminimalkan input untuk mencapai output tertentu juga merupakan pencapaian. Konsep efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas. Efisiensi diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan (biaya produk).

Indikator Rasio Efisiensi

Kinerja Pemerintah Daerah dikatakan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%, atau Semakin kecil rasio efisiensi yang dicapai, maka kinerjanya semakin baik. Tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan (Andriani 2012)

Mengukur hubungan keuangan dilakukan sebagai praktik membeli barang/jasa tertentu yang berkualitas baik dengan harga terbaik (kurang konsumsi). Ekonomis berarti efisiensi/efektif yang juga mencakup pengelolaan yang bijaksana dan bebas. Ukuran keuangan anggaran tercermin dalam tingkat keberhasilan (Pratama, V.Y, Syamsudin & Diva 2022).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

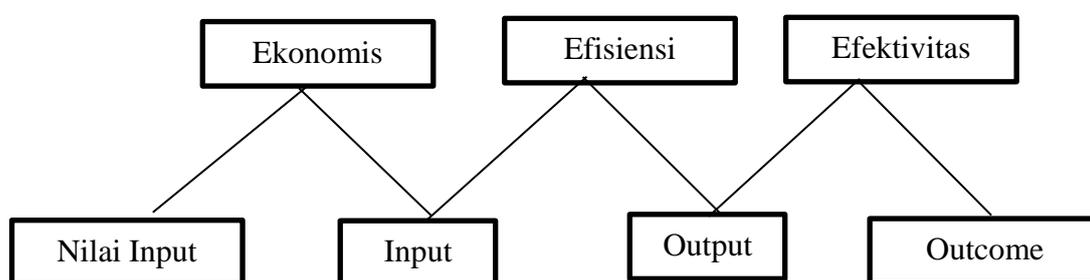
Table 2.2
Kriteria Penilaian Efisiensi Metode Value For Money

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Tidak Efisiensi
90% - 100%	Kurang Efisiensi
80% - 90%	Cukup Efisiensi
60% - 80%	Efisiensi
Kurang Dari 60%	Sangat Efisiensi

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

3. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan targetnya. Efektivitas adalah perbandingan hasil dengan output, dan bagaimana output berhubungan dengan tujuan. Organisasi, program, atau kegiatan lebih efektif jika ada andil *output* (keluaran) terhadap pencapaian tujuan. Efektivitas menekankan hasil, sementara ekonomi menekankan input dan efisiensi proses.



Sumber Mardiasmo (2010)

Gambar 2.1 Skema Value For Money

Indikator Rasio Efektivitas

Outcome (Hasil) merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan, tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan realisasi anggaran dengan anggaran pendapatan (penerimaan) dan presentase tingkat pencapaiannya Renaldi (2014)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pemndapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Table 2.3
Kriteria Penilaian Efektivitas Metode Value For Money

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Tidak Efektivitas
90% - 100%	Kurang Efektivitas
80% - 90%	Cukup Efektivitas
60% - 80%	Efektivitas
Kurang Dari 60%	Sangat Efektivitas

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Medan yang mana penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tempat dan waktu yang berbeda yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rika Wulandari, Sabirin Iskandar, Fausiah (2024)	Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Belanja dengan Menggunakan Metode <i>Value For Money</i> Pada Dinas Pariwisata Kota Makassar Periode 2020-2022	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar yang ditinjau dari elemen Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas telah hampir memenuhi syarat Value for Money dimana setiap elemen hampir mencapai nilai rasio yang hampir mencapai maksimal yang mana disertai dengan penghematan anggaran setiap tahunnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kota Makassar hampir memenuhi syarat Value for Money dimana setiap anggaran yang dialokasikan mampu dikelola secara cepat dalam menjalankan setiap program yang telah ditentukan.
2	Martha Nditra Maya, Suryanto (2024)	Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada Pt. Perkebunan Nusantara VIII	Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil jika kinerja keuangan PT Perkebunan Nusantara VIII periode 2016-2022 pada tingkat ekonomis menunjukkan nilai 90% memenuhi kriteria ekonomis, pada tingkat efisiensi menunjukkan nilai 93% memenuhi kriteria efisiensi, dan pada tingkat efektif menunjukkan nilai 95% tidak memenuhi kriteria efektivitas.
3	Adriana Alesandra Da Cunha, Henrikus Herdi, Pipiet Niken Aurelia (2023)	Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019-2021 jika dilihat dari tingkat ekonomis dikategorikan ekonomis dikarenakan tingkat rasio ekonomisnya kurang dari 100%. Ditinjau dari tingkat efisiensi tahun anggaran 2019-2021 dikategorikan efisiensi dikarenakan rasio

			efisiensinya kurang dari 100%. Ditinjau dari tingkat efektivitas tahun anggaran 2019 dan 2021 dikategorikan tidak efektif karena rasio efektivitasnya kurang dari 100% dan tahun 2020 dikategorikan efektif karena rasio efektivitasnya lebih dari 100%.
4	Melta Idrika, Novi Mubyarto, Efni Anita (2023)	Analisis Pengukuran <i>Value For Money</i> Pada APBDES Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo	Hasil dalam penelitian yang di lakukan maka diperoleh kesimpulan (1) kinerja keuangan Desa Sungai Bengkal Barat dari segi ekonomi ditahun 2018, 2019 dan 2021 berada pada kategori ekonomis, sedangkan tahun 2020 dikategori kan tidak ekonomis, (2) kinerja keuangan Desa Sungai Bengkal Barat dari segi efesiensi tahun 2018, 2019 dan 2020 berada pada kategori efesiensi, sedangkan tahun 2020 dikategorikan tidak efesiensi, (3) kinerja keuangan Desa Sungai Bengkal Barat dari segi efektivitas ditahun 2019 dan 2020 berada pada kategori efektif, sedangkan ditahun 2018 dan 2021 di kategorikan tidak efektif..
5	Najmawati Petta Solong, Yulia Puspitasari Gobel, Arafah Kurniawan (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Value For Money</i> pada Satuan Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo Periode Tahun 2019-2021	Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dengan efisiensi rasio hasil penelitian ini adalah anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo diperoleh bahwa laporan Realisasi anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 masing- masing nilai ekonomis < 100, nilai Efektivitas >100 dan nilai Efisiensi > 100, sehingga dikatakan bahwa laporan realisasi anggaran IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 memenuhi unsur ekonomis, efisiensi dan efektif.
6	Indrayani, Khairunnisa (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe dapat menerapkan <i>value for money</i> sebagai konsep pengukuran kinerjanya, karena dengan konsep <i>value for money</i> pemerintah dapat mengukur kinerja organisasi dengan lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Sumber: Diolah peneliti, 2024

2.3 Kerangka Berfikir Konseptual

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama, dan merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita

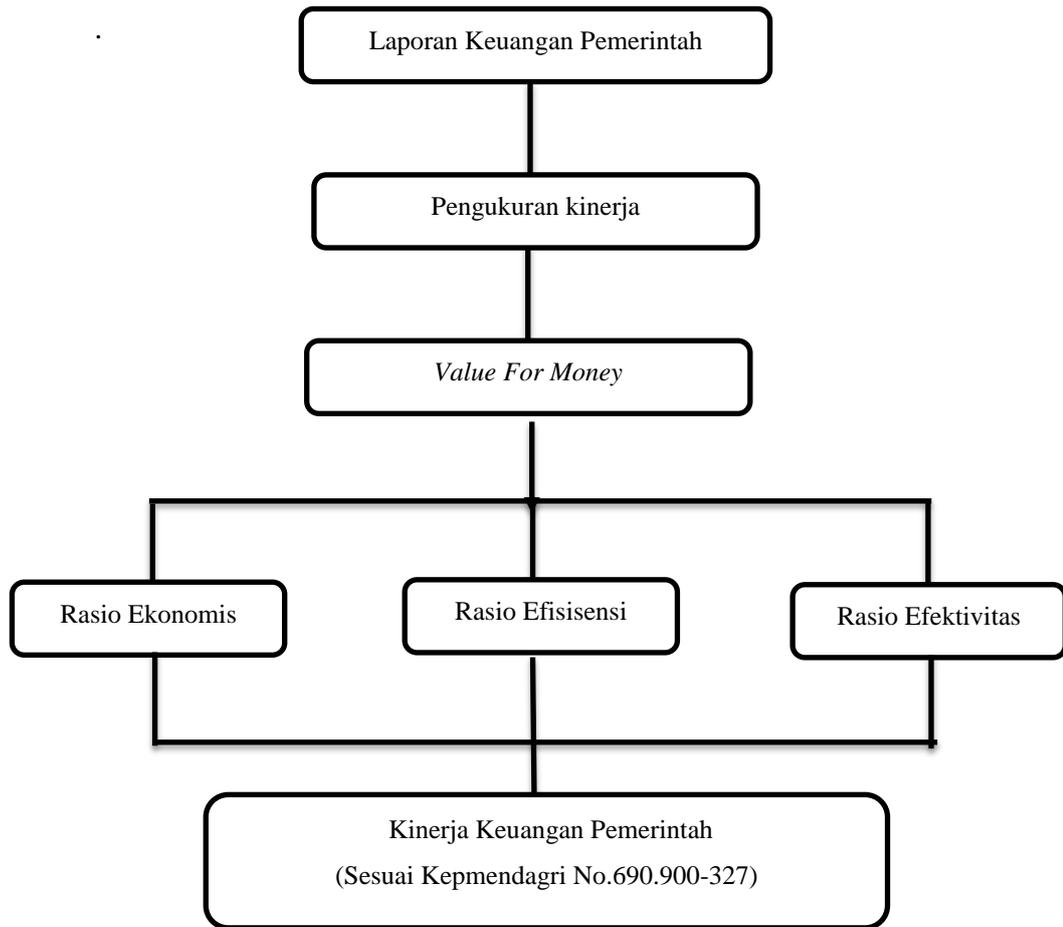
apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.

Rasio Ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya yang terdapat pada laporan realisasi anggaran. Kinerja pemerintah dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai semakin besar dari suatu rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik dan ekonomis.

Rasio Efektivitas menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya. Kemampuan daerah dalam menjalani tugasnya di katagorikan efektif apabila rasio yang di capai melebihi seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio Efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Kinerja pemerintah dalam aktifitasnya akan semakin efisien apabila persentase rasio yang dihasilkan semakin kecil.

Hasil perhitungan rasio ekonomis, efisiensi, serta efektivitas tersebut dapat menggambarkan kinerja keuangan yang dapat diukur *value for money* dalam pendapatan dan belanja daerah kota medan yang dapat dilihat dalam kerangka berpikir dibawah ini



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Belanja dari Pemerintah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk membantu penulis dalam menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.

3.2. Definisi Operasional

Definisi Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, satuan ukuran, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel. Disamping itu, tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini dan juga dapat dikatakan definisi operasional adalah definisi yang menjelaskan bagaimana variabel tersebut dapat di ukur, dengan memberi arti atau penjelasan kegiatan dengan tujuan untuk melihat pentingnya variabel yang di

gunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya. Analisis kinerja Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan konsep *Value for Money* merupakan pengukuran kinerja yang dilakukan untuk mengetahui seberapa ekonomis, efisiensi dan efektif kinerja dari satuan kerja perangkat daerah tersebut pada setiap periode, definisi variabel dari penelitian tersebut adalah :

Metode *Value for Money* yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan organisasi publik yang dapat diukur melalui penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya.

- a) Wayan Anggita Suri, Halilah (2024) Rasio ekonomis *value for money* (VFM) adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proyek atau program memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Rasio ini membantu dalam mengidentifikasi apakah suatu proyek atau program memberikan hasil yang memadai dalam konteks ekonomi. Ekonomi adalah upaya menghemat uang dengan membeli barang dan jasa input dengan kualitas tertentu dengan biaya serendah mungkin. Konsep ekonomi secara keseluruhan juga sering disebut sebagai penghematan, yang juga mencakup pengelolaan yang bijaksana (*prudence*), kehati-hatian, dan menghindari pemborosan

Menurut Mahmudi (2015) secara matematis pengukuran ekonomis dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

**Tabel 3.1. Definisi Operasional
tabel kriteria**

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
Kurang Dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

- b) Menurut Wayan Anggita Suri, Halilah (2024) Rasio efisiensi *value for money* (*VFM*) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu proyek atau program pemerintah memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Rasio ini membantu dalam mengukur apakah penggunaan dana publik untuk suatu proyek atau program telah efisien dan memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat. Dari perspektif sistemik, efisiensi adalah perbandingan output dan input, atau output per unit input. Suatu kegiatan, program, atau organisasi dikatakan efisien jika dapat menghasilkan output tertentu dengan input yang sesedikit mungkin atau paling banyak dengan input yang sesedikit mungkin (*good spending*).

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Biaya}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

- c) Menurut Mahmudi (2013) Rasio efektifitas *value for money* (*VFM*) adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proyek atau program mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam konteks biaya

yang dikeluarkan. Rasio ini membantu dalam mengidentifikasi apakah proyek atau program tersebut berhasil dalam memberikan manfaat yang diharapkan dalam hubungannya dengan biaya yang dikeluarkan. Kisaran dampak dan hasil output program dalam hal pencapaian tujuan program digambarkan oleh indikator efektivitas ini. Proses kerja suatu unit organisasi semakin efisiensi semakin memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Berikut adalah rumus untuk mengukur rasio efektivitas Mahmudi (2013).

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Medan tepatnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.3.2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skedul Penelitian

No	Keterangan	Bulan															
		Des 24				Jan 25				Feb 25				Mar 25			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal			■													
2	Pengambilan Data				■	■	■										
3	Pengolahan Data							■									
4	Penulisan Skripsi								■	■	■						
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■				

3.4. Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data kuantitatif ini berupa data yang dihitung atau diolah dari data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan periode 2019 - 2023.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa data hasil dokumentasi yaitu jumlah hasil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan.

3.5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari dokumentasi laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Medan periode 2019 – 2023 yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus yang ada dalam prinsip *value for money*, yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Setelah itu akan

diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Medan. Data yang dikumpulkan berupa laporan realisasi anggaran dan belanja daerah periode 2019 – 2023.

2. Melakukan analisis terhadap data

Pada tahap ini penulis akan membuat perhitungan *value for money* yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dengan menggunakan rumus yang ada. Setelah itu, hasil setiap perhitungan akan ditampilkan dalam bentuk tabel.

3. Mendeskripsikan hasil perhitungan

Tahap ini menjelaskan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada setiap rasio yang ada dengan melihat berdasarkan kriteria masing-masing rasio.

4. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan

Tahapan terakhir yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara menjadi parameter dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan hak otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Medan dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisiensi sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan pemerataan, keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Didalam Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kota Medan terdapat 3 sub bagian belanja yang harus di realisasikan yaitu, belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Dimana setiap anggaran yang diterima setiap tahunnya akan mengalami perubahan. Berikut adalah hasil perhitungan dari selisish rasio berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada Pememrintah Kota Medan dari tahun 2019-2023:

Tahun	Keterangan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio
2019	Belanja Operasi	4.992.707.636.172,86	4.066.127.201.868,64	81,44%
	Belanja Pegawai	2.057.885.655.821,05	1.798.923.434.981,00	87,41%
	Belanja Barang dan Jasa	2.619.454.280.488,81	2.006.831.526.935,64	76,61%
	Belanja Hibah	300.321.777.700,00	254.079.939.952,00	84,60%
	Belanja Bantuan Sosial	15.045.922.163,00	6.292.300.000,00	41,82%
	Belanja Modal	1.300.255.956.255,00	992.661.245.694,74	76,34%
	Belanja Modal Tanah	154.731.492.200,00	24.746.094.000,00	15,99%
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	281.401.693.765,00	229.035.641.075,13	81,39%
	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	288.235.969.283,19	240.827.998.427,00	83,55%
	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	543.314.136.365,00	467.234.704.167,00	85,99%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.572.664.642,00	30.816.808.025,61	94,60%
	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	599.213.744,63	59,92%
	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	599.213.744,63	59,92%
	2020	Belanja Tidak Langsung	2.809.751.352.261,18	2.076.255.354.959,86
Belanja Pegawai		1.968.273.530.489,18	1.630.919.407.679,91	82,86%
Belanja Hibah		321.377.821.772,00	275.356.641.576,00	85,68%
Belanja Bantuan Sosial		10.100.000.000	1.711.250.000,00	16,94%
Belanja Tidak Terduga		510.000.000.000,00	168.268.055.703,95	32,99%
Belanja Tidak Terduga		510.000.000.000,00	168.268.055.703,95	32,99%
Belanja Langsung		2.444.915.722.138,35	1.778.487.055.776,70	72,74%
Belanja Pegawai		668.928.370.863,00	540.082.019.492,45	80,73%
Belanja Barang dan Jasa		1.328.005.887.937,27	930.126.758.226,92	70,03%
Belanja Modal		447.981.463.338,08	308.278.278.057,33	68,81%
Belanja Modal Tanah		99.781.037.609,00	20.555.152.370,00	20,60%
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin		23.260.919.064,00	22.258.238.520,00	95,68%
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan		66.827.498.738,00	63.412.806.191,00	94,89%
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan		83.002.138.000,00	63.943.233.456,33	77,03%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	269.400.000,00	183.284.000,00	68,03%	
2021	Belanja Operasi	4.721.486.070.425,00	3.833.501.098.374,87	81,19%
	Belanja Pegawai	2.061.059.323.800,00	1.703.889.945.639,97	82,67%
	Belanja Barang dan Jasa	2.307.001.676.891,00	1.823.152.911.869,00	79,02%
	Belanja Hibah	281.649.969.734,00	254.800.940.866,00	90,46%
	Belanja Bantuan Sosial	71.775.100.000	51.657.300.000,00	71,97%
	Belanja Modal	863.671.114.667,00	574.604.617.139,00	66,53%
	Belanja Modal Tanah	98.632.751.194,00	26.369.688.405,00	26,73%
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	271.895.263.303,00	228.537.294.179,00	84,05%
	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	163.765.379.738,00	139.454.699.511	85,15%
	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	325.718.219.680,00	176.879.177.157,00	54,30%
	Belanja Modal Tetap Aset Lainnya	3.659.500.752	3.363.757.887,00	91,91%
	Belanja Tidak Terduga	146.237.877.183,00	91.039.428.798,00	62,25%
	Belanja Tidak Terduga	146.237.877.183,00	91.039.428.798,00	62,25%
	2022	Belanja Operasi	5.279.980.643.883,00	4.411.464.936.830,00
Belanja Pegawai		2.134.996.730.799,00	1.859.029.655.901,00	87,07%
Belanja Barang dan Jasa		2.712.957.639.891,00	2.358.927.781.710,00	86,95%
Belanja Hibah		358.464.172.272,00	136.605.348.219,00	38,11%
Belanja Bantuan Sosial		73.562.100.921,00	56.902.151.000,00	77,35%

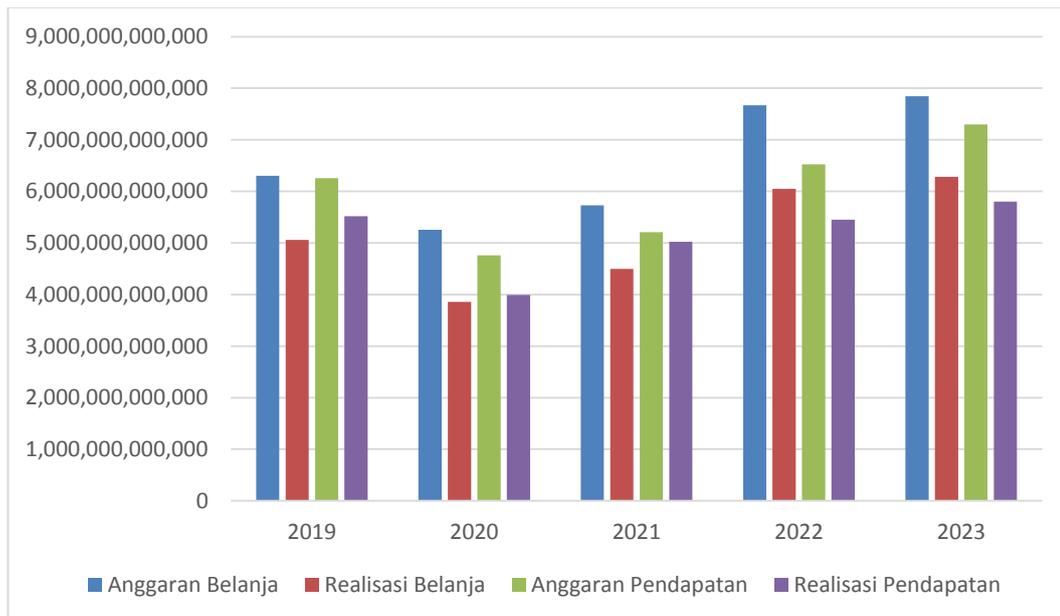
	Belanja Modal	2.325.507.184.562,00	1.617.535.812.652,00	69,69%
	Belanja Modal Tanah	389.660.417.050,00	193.037.001.685,00	49,54%
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	450.144.576.665,00	413.338.138.958,00	91,82%
	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	390.122.762.424,00	325.942.923.423,00	83,55%
	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	1.080.109.067.923,00	670.339.241.437,00	62,06%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.470.360.500,00	14.878.507.149,00	96,17%
	Belanja Tak Terduga	63.232.363.043,00	18.218.423.360,00	28,81%
	Belanja Tak Terduga	63.232.363.043,00	18.218.423.360,00	28,81%
2023	Belanja Operasi	5.422.658.985.633,00	4.788.957.849.977,00	88,31%
	Belanja Pegawai	2.038.507.227.859,00	1.854.598.838.131,00	90,97%
	Belanja Barang dan Jasa	3.004.309.316.194,00	2.571.197.143.166,28	85,58%
	Belanja Hibah	295.652.654.880,00	290.823.938.445,00	98,36%
	Belanja Bantuan Sosial	84.189.786.700,00	72.337.930.235,00	85,92%
	Belanja Modal	2.378.363.903.973,00	1.493.367.508.931,00	62,78%
	Belanja Modal Tanah	307.098.916.980,00	102.440.925.657,00	33,35%
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	347.868.687.106,00	287.203.939.384,00	82,56%
	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	698.775.986.106,00	404.944.131.783,00	57,95%
	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	1.004.417.653.364,00	683.514.637.511,00	63,57%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.202.660.364,00	15.263.874.596,00	75,55%
	Belanja Tak Terduga	43.679.292.966,00	116.184.409,00	26,59%
	Belanja Tak Terduga	43.679.292.966,00	116.184.409,00	26,59%

Penelitian ini akan mengukur kinerja Pemerintahan Kota Medan tahun 2019-2023 menggunakan metode *value for money* dengan tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas dengan Laporan Realisasi Anggaran sebagai sumber data sekunder. Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023.

Table 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2019	6.302.963.592.428	5.059.387.661.308	80,26%	6.257.239.035.331	5.518.722.179.306
2020	5.254.667.074.399,53	3.854.742.410.736,56	73,35%	4.757.852.448.866,16	3.988.761.485.152,01
2021	5.731.395.062.275	4.499.145.144.311,87	78,50%	5.208.964.175.119	5.023.080.346.608,29
2022	7.668.720.191.488	6.047.219.172.842	78,86%	6.522.123.770.774	5.449.340.586.722,85
2023	7.844.702.182.572	6.282.441.543.317	80,08%	7.296.157.352.009	5.802.580.478.749,50

Sumber: LRA Pemerintah Kota Medan setelah diolah



Grafik LRA Pemerintah Kota Medan 2019-2023

4.2 Pembahasan

4.2.1. Analisis Data

1. Rasio Ekonomis

Dalam bahasa organisasi pemerintah, ukuran ekonomis dinyatakan sebagai anggaran yang didistribusikan untuk membiayai kegiatan tertentu. Penghematan terjadi ketika sumber daya yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran. Pengukuran rasio ekonomis memahami bahwa dalam mendapatkan kualitas dan kuantitas tertentu dari sumber daya (input) lebih baik jika dengan harga yang lebih murah atau harga yang mendekati harga pasar. Rasio ekonomis merupakan perbandingan antara realisasi biaya yang digunakan dengan anggaran biaya yang digunakan, dapat dicari dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Table 4.2
Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Medan

Tahun	Perhitungan Laporan Realisasi	Rasio Ekonomis	Kategori
2019	$\frac{5.059.387.661.308}{6.302.963.592.428} \times 100\%$	80,27%	Cukup Ekonomis
2020	$\frac{3.854.742.410.736,56}{5.254.667.074.399,53} \times 100\%$	73,36 %	Kurang Ekonomis
2021	$\frac{4.499.145.144.311,87}{5.731.395.062.775} \times 100\%$	78,50%	Kurang Ekonomis
2022	$\frac{6.047.219.172.842}{7.668.720.191.488} \times 100\%$	78,86%	Kurang Ekonomis
2023	$\frac{6.282.441.543.317}{7.844.702.182.572} \times 100\%$	80,09%	Cukup Ekonomis

1. Dari tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan resio ekonomis berdasarkan metode *value for money* pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dihasilkan bahwa realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan **Kurang Ekonomis** karena persentase rasio berada dibawah 80%.
2. Hasil perhitungan rasio ekonomis berdasarkan metode *value for money* pada tahun 2019 dan 2023 dihasilkan bahwa realisasi anggaran pemerintah kota Medan **cukup ekonomis** karena persentase rasio besar dari sama dengan 80%.

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi yaitu bertujuan untuk mencapai keluaran yang tertinggi dengan masukan tertentu, atau menggunakan masukan yang murah untuk mendapatkan output tertentu. Pengukuran Efisiensi dikatakan efisiensi

apabila pencapaian nilai output lebih besar dibandingkan dengan nilai input. Efisiensi diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan (biaya produk). Pengukuran efisiensi dapat dinyatakan dalam rumus berikut :

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Biaya}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Table 4.3
Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Medan

Tahun	Perhitungan Laporan Realisasi	Rasio Efisiensi	Kategori
2019	$\frac{5.059.387.661.308}{5.518.722.179.306} \times 100\%$	91,68%	Kurang Efisiensi
2020	$\frac{3.854.742.410.736,56}{3.988.761.485.152,01} \times 100\%$	96,64 %	Kurang Efisiensi
2021	$\frac{4.499.145.144.311,87}{5.023.080.346.608,29} \times 100\%$	89,57%	Cukup Efisiensi
2022	$\frac{6.047.219.172.842}{5.449.340.586.722,85} \times 100\%$	110,97%	Tidak Efisiensi
2023	$\frac{6.282.441.543.317}{5.802.580.478.749,50} \times 100\%$	108,27%	Tidak Efisiensi

1. Hasil perhitungan rasio efisiensi berdasarkan metode *value for money* didapatkan hasil bahwa pada tahun 2019 dan 2020 dihasilkan bahwa realisasi anggaran pemerintah kota Medan **kurang efisiensi** karena persentase rasio berada diatas 90%.
2. Hasil perhitungan rasio efisiensi berdasarkan metode *value for money* pada tahun 2021 dihasilkan bahwa realisasi anggaran pemerintah kota Medan **cukup efisiensi** karena persentase rasio berada dibawah 90%

3. Hasil perhitungan rasio efisiensi berdasarkan metode *value for Money* pada tahun 2022 dan 2023 realisasi anggaran pemerintah kota Medan **Tidak Efisiensi** karena Persentase Rasio berada diatas 100%.

3. Rasio Efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Pengukuran rasio efektivitas yaitu perolehan hasil program dengan tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dan dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Table 4.4
Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Medan

Tahun	Perhitungan Laporan Realisasi	Rasio Efektif	Kategori
2019	$\frac{5.518.722.179.306}{6.257.239.035.331} \times 100\%$	88,20%	Cukup Efektivitas
2020	$\frac{3.988.761.485.152,01}{4.757.852.448.866,16} \times 100\%$	83,84 %	Cukup Efektivitas
2021	$\frac{5.023.080.346.608,29}{5.208.964.175.119} \times 100\%$	96,43%	Efektivitas
2022	$\frac{5.449.340.586.722,85}{6.522.123.770.774} \times 100\%$	83,55%	Cukup Efektivitas
2023	$\frac{5.802.580.478.749,50}{7.296.157.352.009} \times 100\%$	79,53%	Kurang Efektivitas

1. Hasil perhitungan rasio efektivitas berdasarkan metode *value for money* pada tahun 2019, 2020 dan 2022 realisasi anggaran pemerintah kota Medan **cukup efektivitas** karena persentase rasio berada diatas 80%.
2. Hasil perhitungan rasio efektivitas berdasarkan metode *value for money* pada tahun 2021 realisasi anggaran pemerintah kota Medan **Efektivitas** karena persentase rasio berada diatas 90%.
3. Hasil perhitungan rasio efisiensi berdasarkan metode *value for Money* pada tahun 2023 realisasi anggaran pemerintah kota Medan **kurang efektivitas** karena Persentase Rasio berada dibawah 80%.

4.2.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan berdasarkan Metode Value For Money

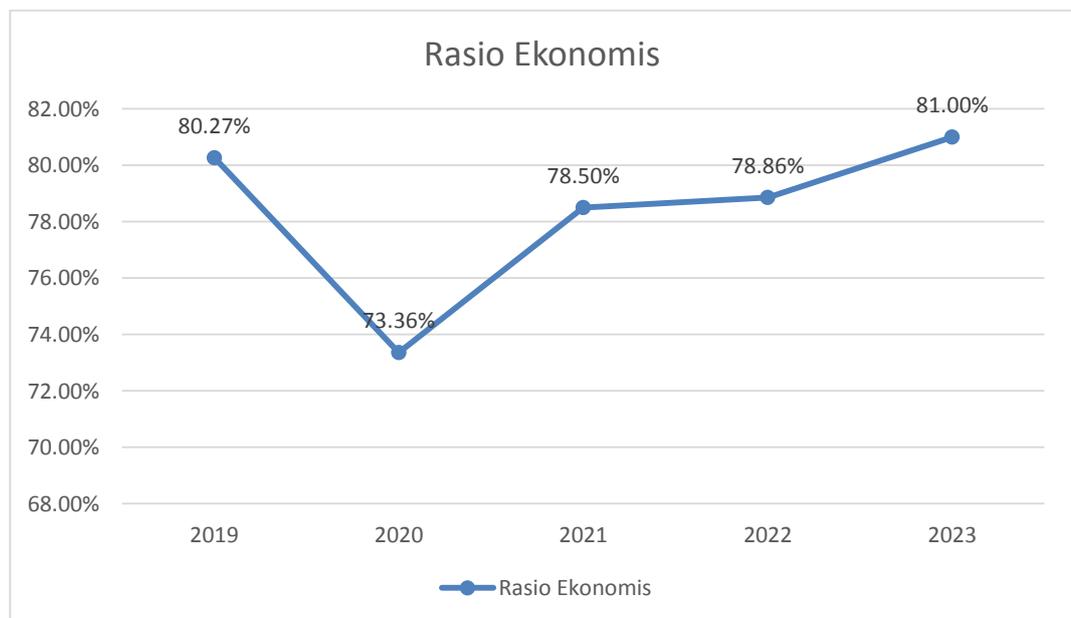
1. Rasio Ekonomis

Dilihat dari tabel 4.2, maka untuk Rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2019 rasio ekonomis sebesar 80,27%, hal ini termasuk kedalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% sampai 90%, untuk tahun 2020 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 73,36%, yang termasuk kedalam kategori kurang ekonomis karena diantara 60% sampai 80%, untuk tahun 2021 rasio ekonomis mengalami peningkatan menjadi 78,50%, tetapi masih termasuk kedalam kategori kurang ekonomis karena diantara 80% sampai 80% untuk tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 78,86%, tetapi masih termasuk kedalam kategori kurang ekonomis karena diantara 80% sampai 90%. Dan untuk tahun 2023 rasio ekonomis mengalami kenaikan menjadi 80,09%, yang termasuk kedalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% sampai 90%. Dimana standar dari rasio ekonomis adalah 100%, maka yang dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota

Medan masih belum cukup dalam melakukan alokasi tepat guna dalam anggaran belanjanya.

Untuk anggaran belanja dari 2019 sampai 2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 diakibatkan rendahnya serapan anggaran ditahun 2020 yang disebabkan banyak faktor, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio ekonomis atas Pemerintah Kota Medan yang mengalami penurunan.

Perkembangan rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena perubahan jumlah belanja Pemerintah Kota Medan setiap tahunnya. Melalui analisis rasio ekonomis dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja Pemerintah Kota Medan terhadap target belanja yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Medan yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang

mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan serta tepat guna. Dengan semakin besar persentasi ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik (Mahsun, 2016).

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Ekonomis} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{5.148.587.186.503,086}{6.560.489.620.732,506} \times 100\% \\
 &= 78,48\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk kinerja Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan *Metode Value For Money* dapat dikatakan rasio ekonomis berada pada kategori kurang baik. Dimana hasil rata-rata rasio tingkat ekonomisnya sebesar 78,48% dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2019 sampai 2023. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Medan dapat dikatakan **Kurang Ekonomis** dalam pengelolaan pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Munandar, 2021) pada Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan 2019, yang menghasilkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berada pada kategori **kurang ekonomis**.

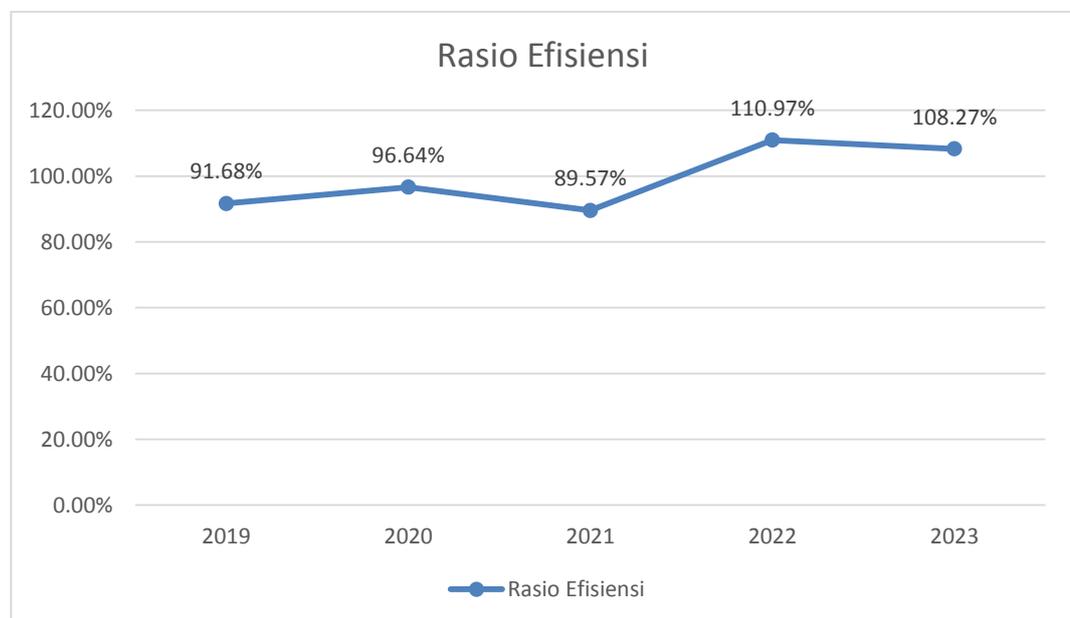
2. Rasio Efisiensi

Dapat dilihat dari tabel 4.3 untuk Rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 91,68%, yang termasuk dalam kategori kurang efisiensi karena berada diantara 90% sampai 100%, untuk tahun 2020 rasio efisiensi mengalami kenaikan menjadi 96,64% yang termasuk dalam kategori kurang efisiensi karena berada diantara

90% sampai 100%, untuk tahun 2021 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 89,57%, yang termasuk kedalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% sampai 90%, untuk tahun 2022 rasio efisiensi mengalami kenaikan menjadi 110,97%, yang termasuk kedalam kategori tidak efisiensi karena berada diatas 100%.

Untuk tahun 2023 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 108,27%, tetapi masih saja termasuk kategori tidak efisiensi karena berada diatas 100%. Dimana standar rasio efisiensi yang dicapai kurang dari 100% atau semakin kecil rasio efisiensi yang dicapai, maka kinerjanya semakin baik. Tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan (Andriani, 2012).

Perkembangan rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan dapat dilihat dalam grafik tersebut:



$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{5.148.587.186.503,086}{5.156.497.015.307,73} \times 100\% \\
 &= 99,85\%
 \end{aligned}$$

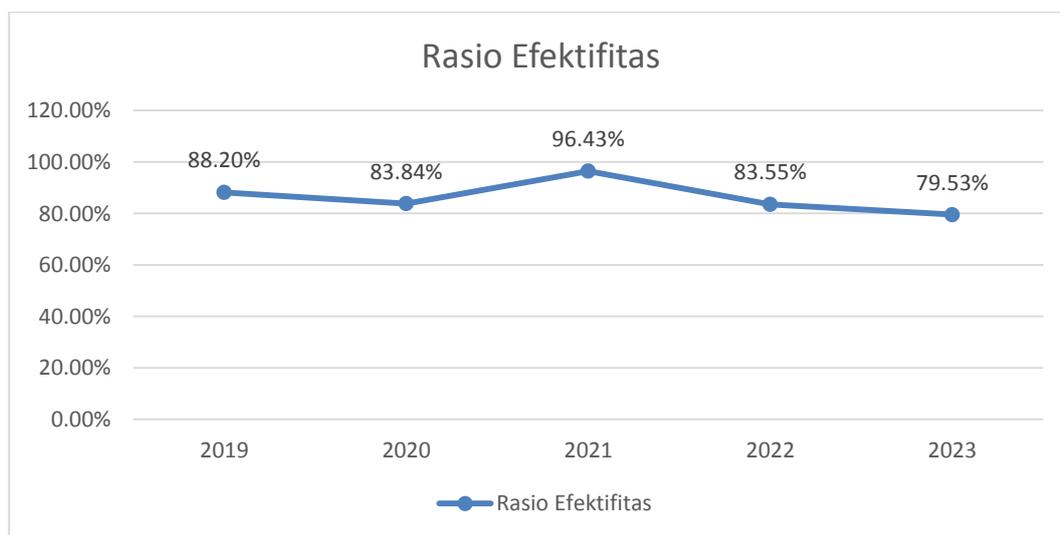
Berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk kinerja Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan *Metode Value For Money* dapat dikatakan rasio efisiensi berada pada kategori tidak baik. Dimana hasil rata-rata rasio tingkat efisiensi adalah sebesar 99,85% dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2019 sampai 2023 kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dikatakan **Kurang Efisien**. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Munandar, 2021) pada Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan 2019, yang menghasilkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berada pada kategori **tidak efisien**.

3. Rasio Efektivitas

Dilihat dari tabel 4.4, maka untuk rasio efektivitas Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 88,20%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena, berada diantara 80% sampai 90%, untuk tahun 2020 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 83,83%, tetapi masih termasuk dalam kategori cukup efektif karena masuk karena berada diantara 80% sampai 90%, untuk tahun 2021 rasio ekonomis mengalami kenaikan sebesar 96,43%, yang termasuk dalam kategori efektif, karena berada diantara 90% sampai 100%, untuk tahun 2022 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi

83,55%, namun masi termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada dianatar 80% sampai 90%.

Perkembangan rasio efektivitas Pemerintah Kota Medan dapat dilihat dalam grafik tersebut:



$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggara Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{5.156.497.015.307,73}{6.008.467.356.419,832} \times 100\% \\
 &= 85,82\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk kinerja Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode *value for money* dapat dikatakan rasio efektivitas berada pada kategori **cukup efektivitas** dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 85,82% dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2019 sampai 2023. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Munandar, 2021) pada Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan 2019, yang menghasilkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berada pada kategori **sangat efektivitas**.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja pemerintah kota medan berdasarkan penelitian ini yang di ukur melalui konsep *value for money* mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio ekonomis dari tahun 2019 sampai tahun 2023 pada Pemerintah Kota Medan berada pada kategori kurang ekonomis, hal ini terjadi pada rasio ekonomis dikarenakan meningkatnya jumlah anggaran belanja serta disandingkan realisasinya, yang menunjukkan bahwa penggunaan dalam belanja Pemerintah Kota Medan kurang ekonomis dan tidak tepat guna sehingga anggaran yang digunakan susah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.
2. Rasio efisiensi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 pada Pemerintah Kota Medan berada pada kategori kurang efisiensi, hal ini terjadi karena lebih besarnya perbandingan belanja dari pendapatan yang ada membuat kinerjanya dikategorikan kurang efisiensi.
3. Rasio efektivitas dari tahun 2019 sampai tahun 2023 Pemerintah Kota Medan berada pada kategori cukup efektivitas karena realisasi pendapatannya sudah sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan.
4. Kinerja Pemerintah Kota Medan diukur menggunakan metode *value for money* yaitu berdasarkan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Menghasilkan bahwa pemerintah Kota Medan memiliki rasio kurang ekonomis, kurang efisiensi, dan cukup efektivitas. Hal ini menunjukkan

bahwa Pemerintah Kota Medan belum optimal dan belum cukup baik dalam mengelola dana anggarannya sehingga mengalami pengeluaran yang belum tepat sasaran.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sajikan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan *Value For Money*, diperlukan penyesuaian pengeluaran belanja operasi agar tidak terlalu besar dan pelaksanaan anggaran tidak hanya altifitas operasional saja.
2. Berkaitan dengan tingkat realisasi belanja daerah, agar semua unsur terkait dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik sehingga memberikan dampak terhadap pelaksanaan anggaran yang ekonomis, efektif, efisiensi serta tepat waktu.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dan isu permasalahan agar mendapatkan informasi yang lebih luas terkait penerapan akuntansi pada instansi sektor publik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Hanya mengambil 1 sampel dari OPD Kota Medan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan melihat laporan realiasi anggaran dari tahun 2019-2023.
2. Dalam menilai pengukuran kinerja hanya menggunakan satu metode yaitu metode *value for money*.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Prinsip Penyusunan APBD.
- Andi. (2022). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi*. Media Sains Indonesia . Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, & Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Indonesia* (BPFE). Jakarta : Erlangga.
- Donalson, Davis, Lex, James, & H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49-64.
- Faud. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Halim, A ., & Kusufi, M. S. (2017). (2017a). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*.
- Hanum, Zulia. (2011). *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai*. 10(02).
- Leandha, M. (2022). Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Dimulai, Presiden Letakan Batu Pertama.
<https://www.kompas.com/properti/read/2022/07/08/073000621/revitalisasi-lapangan-merdeka-medan-dimulai-presiden-letakkan-batu>.
- M. Mahsun. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik*. Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.
- Majid. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Almida.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Menkes, R. I. (n. d. -b. (2017). *Operational Auditing: Principles and Techniques For a Change World* (T. & F. Group (ed.)). CRC Press.
- Munandar, A. (2021). ANALISIS VALUE FOR MONEY UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi & Akuntansi (MEA)*, 5(3).
- Novi Fadhila, J. S. T. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(02).
- Nurmala, Eka Sari, Heny Triastuti K, Y. E. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Medan. Perdana Publishingh.
- Pemerintah, P. N. 38 T. 2015. (n.d.). *Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Pratama, V.Y, Syamsudin & Diva, F. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. *Akuntansi Dan Keuangan*, 2, 149–155.
- Purnama Warsani sari, Y. (2022). *Akuntansi Sektor Publik* (S. ko. Fachrurozi (ed.)). Universitas Medan Area.
- Renaldi, P. (2014). Penerapan Konsep Value For Money Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir. *Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma*.
- Said, M. (2023). Wali kota Medan tegaskan lampu “pocong” dianggap proyek gagal. <https://M.Antaraneews.Com/Berita/3529890/Wali-Kota-Medan-Tegaskan-Lampu-Pocong-Dianggap-Proyek-Gagal>.
- SAP. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Komite Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Saragih Fitriani, Elizsar Sinambela, E. N. S. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2.
- Sari, C., & Nindi. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value For Money. *Akuntansi UNESA*, 3, 1.

- Sinambela Elizar, R. K. A. P. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1).
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Akuntansi*. Prenadamedia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Tahun, P. N. 02 P. N. 71. (2010). *Tentang Standar Akuntansi*.
- Ulum. (2012). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Sinar Grafika Offset.
- Wayan Anggita Suri, Halilah, N. (2024). AKRUAL. *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI KONTEMPORER*, 17(1).
- Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Rajawali Press.
- Wandasari, D, & Aqwa Naser Daulay. (2023). Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal Manajemen*, 1(4), 86–96.

LAMPIRAN

Lampiran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Periode 19 2010

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	#/D PERIODE LALU	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
				PERIODE INI	TOTAL	
4.1.3.02	Bagian Laba atas Penyerahan Modal pada Perusahaan MIK Negeri/BLN - LRA	10.144.465.116,00	0,00	12.987.250.762,00	12.987.250.762,00	2.842.785.646,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	390.299.508.371,00	0,00	221.185.121.267,27	259.118.121.267,27	(138.114.387.103,73)
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Grr - LRA	17.000.000.000,00	0,00	22.867.495.990,00	22.867.495.990,00	5.867.495.990,00
4.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak - LRA	5.000.000.000,00	0,00	4.105.127.695,57	4.105.127.695,57	(894.872.304,43)
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	7.902.049.032,00	0,00	48.852.963.538,95	48.852.963.538,95	40.950.920.506,95
4.1.4.28	Pendapatan BLUD - LRA	206.878.833.000,00	0,00	91.202.749.601,75	91.202.749.601,75	(115.676.083.398,25)
4.1.4.23	Pendapatan Dana Kelemb. JKN - LRA	153.518.632.319,00	0,00	85.156.794.441,00	85.156.794.441,00	(68.361.847.878,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	3.636.639.051.273,00	0,00	3.401.878.083.928,00	3.401.878.083.928,00	(234.760.967.345,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.322.736.850.000,00	0,00	2.156.807.334.247,00	2.156.807.334.247,00	(165.929.515.753,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	217.156.947.000,00	0,00	135.512.655.615,00	135.512.655.615,00	(81.644.291.385,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.307.634.000,00	0,00	3.662.066.517,00	3.662.066.517,00	(1.645.567.483,00)
4.2.1.03	Dana Abkasi Umum (DAU) - LRA	1.666.885.959.000,00	0,00	1.660.238.913.000,00	1.660.238.913.000,00	(26.647.046.000,00)
4.2.1.04	Dana Abkasi Khusus (DAK) - LRA	413.386.318.000,00	0,00	357.293.699.115,00	357.293.699.115,00	(55.992.610.885,00)
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	1.313.902.201.273,00	0,00	1.245.070.749.711,00	1.245.070.749.711,00	(68.831.451.562,00)
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	307.839.600.000,00	0,00	287.224.140.000,00	287.224.140.000,00	(20.615.460.000,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	307.839.600.000,00	0,00	287.224.140.000,00	287.224.140.000,00	(20.615.460.000,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	307.839.600.000,00	0,00	287.224.140.000,00	287.224.140.000,00	(20.615.460.000,00)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	6.302.963.952.428,05	0,00	5.059.387.661.308,01	5.059.387.661.308,01	(1.243.576.291.120,04)
5	BELAJA	4.992.707.638.172,86	0,00	4.066.127.201.868,64	4.066.127.201.868,64	(926.580.436.304,22)
5.1	BELAJA OPERASI	2.057.885.652.821,05	0,00	1.798.923.434.981,00	1.798.923.434.981,00	(258.962.220.840,05)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.166.754.999.821,05	0,00	999.032.832.374,00	999.032.832.374,00	(167.722.170.447,05)
5.1.1.01	Belanja Tambahan Peningkatan PNS	767.231.088.000,00	0,00	697.380.932.244,00	697.380.932.244,00	(69.851.155.756,00)
5.1.1.02	Belanja Perumahan lainnya Peningkatan dan Anggaa PRSD serta KDN/WDH	12.169.823.000,00	0,00	11.100.479.060,00	11.100.479.060,00	(1.069.343.940,00)
5.1.1.03	Belanja Uang Lembor	15.812.506.000,00	0,00	12.965.152.430,00	12.965.152.430,00	(2.857.353.570,00)
5.1.1.06	Transfer Pajak dan Retribusi Daerah	95.906.239.000,00	0,00	78.444.041.873,00	78.444.041.873,00	(17.462.197.127,00)
5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.619.454.280.488,81	0,00	2.006.811.526.935,64	2.006.811.526.935,64	(612.642.753.553,17)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pokok Hebis	196.533.852.245,81	0,00	117.693.750.683,00	117.693.750.683,00	(78.840.101.562,81)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	250.694.545.41,00	0,00	157.603.371.959,73	157.603.371.959,73	(93.091.173.791,27)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	404.925.704.076,00	0,00	377.193.271.887,13	377.193.271.887,13	(27.731.972.188,87)
5.1.2.04	Belanja Pritri Asuransi	115.316.255.326,00	0,00	91.002.801.690,00	91.002.801.690,00	(24.313.453.726,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.440.754.321,00	0,00	72.276.401.695,00	72.276.401.695,00	(9.611.412.416,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.955.763.400,00	0,00	32.417.098.282,99	32.417.098.282,99	(14.023.656.038,01)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Garasi/Parkir	2.911.753.182,80	0,00	13.307.811.722,00	13.307.811.722,00	(8.647.951.568,00)
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		0,00	1.741.378.100,00	1.741.378.100,00	(1.170.375.082,80)

KODE REKENING	URLAHN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	REALISASI PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
4.2.2.2	Dana Absekat Umum	1.560.556.851.000,00	0,00	1.493.919.764.000,00	1.493.919.764.000,00	(67.037.087.000,00)
4.2.2.2.01	Dana Absekat Umum	1.560.556.851.000,00	0,00	1.493.919.764.000,00	1.493.919.764.000,00	(67.037.087.000,00)
4.2.2.3	Dana Absekat Khusus	348.592.969.355,00	0,00	345.118.339.574,00	345.118.339.574,00	(3.474.629.781,00)
4.2.2.3.01	Dana Absekat Khusus (Dak)	348.592.969.355,00	0,00	345.118.339.574,00	345.118.339.574,00	(3.474.629.781,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	826.582.780.000,00	0,00	422.707.329.427,00	422.707.329.427,00	(403.875.450.573,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	176.382.780.000,00	0,00	0,00	0,00	(176.382.780.000,00)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	127.659.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(127.659.200.000,00)
4.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	48.523.580.000,00	0,00	0,00	0,00	(48.523.580.000,00)
4.3.1.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	650.000.000.000,00	0,00	414.168.796.427,00	414.168.796.427,00	(235.831.203.573,00)
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	650.000.000.000,00	0,00	414.168.796.427,00	414.168.796.427,00	(235.831.203.573,00)
4.3.4	Dana Penyelesaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	8.538.533.000,00	8.538.533.000,00	8.538.533.000,00
4.3.4.01	Dana Penyelesaian	0,00	0,00	8.538.533.000,00	8.538.533.000,00	8.538.533.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	5.254.667.074.399,53	0,00	3.854.742.410.756,56	3.854.742.410.756,56	(1.399.924.663.642,97)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.809.751.352.261,18	0,00	2.076.355.354.959,86	2.076.355.354.959,86	(733.395.997.301,32)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.968.273.530.489,18	0,00	1.630.919.407.579,91	1.630.919.407.579,91	(337.354.122.909,27)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.157.737.450.489,18	0,00	969.929.549.000,00	969.929.549.000,00	(187.807.901.489,18)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Pembayaran PHS	726.288.713.000,00	0,00	600.426.215.112,91	600.426.215.112,91	(125.862.497.887,09)
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Bantu Pngpin dan anggota DPRD serta KCH/WKCH	11.528.650.000,00	0,00	10.028.215.116,00	10.028.215.116,00	(1.500.434.884,00)
5.1.1.05	Inventor Pajak dan Retribusi Daerah	72.718.717.000,00	0,00	50.535.428.371,00	50.535.428.371,00	(22.183.288.629,00)
5.1.4	Belanja Hibah	321.377.811.772,00	0,00	275.356.641.576,00	275.356.641.576,00	(46.021.160.196,00)
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kementerian/Perwakilan	212.898.550.220,00	0,00	185.656.099.396,00	185.656.099.396,00	(27.242.450.824,00)
5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.08	Belanja BOP Pajud	19.770.800.000,00	0,00	13.623.300.000,00	13.623.300.000,00	(6.147.500.000,00)
5.1.4.09	Belanja BOP Pendidikan Kesehatan	7.402.222.372,00	0,00	7.393.050.000,00	7.393.050.000,00	(9.172.372,00)
5.1.4.10	Belanja Bantuan Pendidikan Kesejahteraan Guru	45.249.250.000,00	0,00	42.421.521.000,00	42.421.521.000,00	(2.827.729.000,00)
5.1.4.11	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.810.493.180,00	0,00	1.800.881.180,00	1.800.881.180,00	(9.612.000,00)
5.1.4.12	Belanja Hibah Pemvasta	34.246.506.000,00	0,00	24.461.790.000,00	24.461.790.000,00	(9.784.716.000,00)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.100.000.000,00	0,00	1.711.250.000,00	1.711.250.000,00	(8.388.750.000,00)
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	5.000.000.000,00	0,00	1.711.250.000,00	1.711.250.000,00	(3.288.750.000,00)
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	5.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.100.000.000,00)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	510.000.000.000,00	0,00	168.268.055.703,95	168.268.055.703,95	(341.731.944.296,05)

LOKASI REALISASI ANGGARAN PERJUANGAN DAN BELANJA DAERAH

Periode 6-5-2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	REALISASI		TOTAL	LEBIH / (KURANG)
				PERIODE INI			
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	897.701.694.645,00	0,00	917.593.972.448,00	917.593.972.448,00	19.892.287.803,00	
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	897.701.694.645,00	0,00	917.593.972.448,00	917.593.972.448,00	19.892.287.803,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM	127.659.200.000,00	0,00	138.993.904.317,00	138.993.904.317,00	11.334.704.317,00	
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sosial dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	127.659.200.000,00	0,00	133.543.904.317,00	133.543.904.317,00	4.884.704.317,00	
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	127.659.200.000,00	0,00	133.543.904.317,00	133.543.904.317,00	4.884.704.317,00	
5	BELANJA DAERAH	5.771.139.062.275,00	0,00	4.499.145.144.311,87	4.499.145.144.311,87	(1.272.249.917.963,13)	
5.1	BELANJA OPERASI	4.221.068.076.425,00	0,00	3.833.501.098.374,87	3.833.501.098.374,87	(887.984.972.050,13)	
5.1.1	Belanja Pegawai	2.061.059.323.800,00	0,00	1.703.899.945.639,87	1.703.899.945.639,87	(357.160.378.160,13)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.063.662.371.418,00	0,00	892.572.446.251,00	892.572.446.251,00	(171.089.925.167,00)	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	767.558.420.010,00	0,00	657.933.916.360,87	657.933.916.360,87	(109.624.503.649,13)	
5.1.1.03	Tambahan penghasilan berdasarkan Penimbangan Objektif	115.986.357.372,00	0,00	78.199.693.665,00	78.199.693.665,00	(37.786.663.707,00)	
5.1.1.04	Lain-lain ASN	47.613.169.000,00	0,00	38.228.590.110,00	38.228.590.110,00	(9.384.578.890,00)	
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	842.606.000,00	0,00	179.120.682,00	179.120.682,00	(663.485.318,00)	
5.1.1.06	Belanja Perumahan Lainnya Penghasilan KOP/WKOH	3.731.400.000,00	0,00	3.272.209.150,00	3.272.209.150,00	(459.190.850,00)	
5.1.1.99	Belanja Perumahan Lainnya Penghasilan DPRD serta KOP/WKOH	61.665.000.000,00	0,00	33.503.969.421,00	33.503.969.421,00	(28.161.030.579,00)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.307.001.676.891,00	0,00	1.823.152.911.869,00	1.823.152.911.869,00	(483.848.765.022,00)	
5.1.2.01	Belanja Barang	631.771.587.987,00	0,00	416.944.654.501,00	416.944.654.501,00	(214.826.933.486,00)	
5.1.2.02	Belanja Jasa	1.356.123.678.091,00	0,00	1.202.989.777.129,00	1.202.989.777.129,00	(153.133.900.962,00)	
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	91.749.229.271,00	0,00	80.302.508.977,00	80.302.508.977,00	(11.446.720.294,00)	
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	122.792.882.480,00	0,00	65.636.067.243,00	65.636.067.243,00	(57.156.815.237,00)	
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	7.116.453.062,00	0,00	4.379.373.895,00	4.379.373.895,00	(2.737.079.167,00)	
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.447.846.000,00	0,00	52.900.530.124,00	52.900.530.124,00	(44.547.315.876,00)	
5.1.5	Belanja Hibah	201.649.969.734,00	0,00	254.800.940.866,00	254.800.940.866,00	(26.849.028.868,00)	
5.1.5.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	8.950.522.000,00	0,00	8.005.000.000,00	8.005.000.000,00	(945.522.000,00)	
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Komunitas yang Berbadan Hukum Indonesia	231.005.729.354,00	0,00	202.941.075.718,00	202.941.075.718,00	(28.064.653.636,00)	
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS	39.892.837.200,00	0,00	42.053.983.968,00	42.053.983.968,00	2.161.146.768,00	
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Pihak Ketiga	1.800.881.180,00	0,00	1.800.881.180,00	1.800.881.180,00	0,00	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	71.775.100.000,00	0,00	51.657.300.000,00	51.657.300.000,00	(20.117.800.000,00)	
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	65.275.100.000,00	0,00	46.761.300.000,00	46.761.300.000,00	(18.513.800.000,00)	
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	6.500.000.000,00	0,00	4.896.000.000,00	4.896.000.000,00	(1.604.000.000,00)	
5.2	BELANJA MODAL	863.671.114.667,00	0,00	574.604.617.139,00	574.604.617.139,00	(289.066.497.528,00)	

Lampiran Realisasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah

Periode 1-9-2019

Halaman 2 dari 4

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan - LRA	1.a	6.522.123.770.774,00	5.449.340.586.722,85	83,55	5.023.080.346.608,29
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	1.a.1)	3.050.594.560.414,00	2.230.554.495.746,85	73,12	1.906.512.189.047,29
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.a.1).a)	2.587.779.709.433,00	1.961.927.116.118,00	75,82	1.495.751.736.668,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.a.1).b)	237.897.911.754,00	113.129.542.274,00	47,55	123.663.556.072,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1.a.1).c)	23.941.152.227,00	17.677.645.359,53	73,64	16.204.047.203,00
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	1.a.1).d)	200.975.787.000,00	137.820.191.997,32	68,50	270.892.847.014,29
Pendapatan Transfer - LRA	1.a.2)	3.389.568.278.235,00	3.150.952.724.119,00	92,96	2.977.574.253.244,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.a.2).a)	2.340.366.281.000,00	2.092.558.622.879,00	89,41	2.059.980.280.796,00
Dana Perimbangan	1.a.2).a)	2.328.865.618.000,00	2.081.057.959.879,00	89,36	2.059.980.280.796,00
Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	1.a.2).a).(1)	200.055.508.000,00	235.313.166.305,00	117,62	272.528.874.947,00
Dana Alokasi Umum - LRA	1.a.2).a).(2)	1.526.073.171.000,00	1.499.537.015.294,00	98,26	1.526.073.171.000,00
Dana Alokasi Khusus Fiskal - LRA	1.a.2).a).(3)	602.736.939.000,00	346.207.778.280,00	57,44	261.378.234.849,00
Dana Insentif Daerah	1.a.2).a).(4)	11.500.663.000,00	11.500.663.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	1.a.2).b)	1.049.221.997.235,00	1.058.394.103.240,00	100,87	917.593.972.448,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	1.a.2).b).(1)	874.221.997.235,00	912.519.667.280,00	104,39	917.593.972.448,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi - LRA	1.a.2).b).(2)	175.000.000.000,00	145.774.435.960,00	83,30	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	1.a.3)	81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	82,78	138.993.904.317,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0	6.450.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	82,78	132.543.904.317,00
Belanja	1.b	7.668.720.191.488,00	6.047.219.172.842,00	78,86	4.499.145.144.311,87
Belanja Operasi	1.b.1)	5.279.980.643.883,00	4.411.464.936.830,00	83,55	3.833.501.098.374,87
Belanja Pegawai	1.b.1).a)	2.134.996.730.799,00	1.859.029.655.901,00	87,07	1.703.889.945.639,87
Belanja Barang dan Jasa	1.b.1).b)	2.712.957.639.891,00	2.358.927.781.710,00	86,95	1.823.152.911.869,00

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN


 PEMERINTAH KOTA MEDAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan - LRA	1.a	7.296.157.352.009,00	5.802.580.478.749,50	79,53	5.449.340.586.722,85
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	1.a.1)	3.751.632.336.388,00	2.442.782.732.668,50	65,11	2.230.554.495.746,85
Pendapatan Pajak Daerah -LRA	1.a.1).a)	3.101.456.231.350,00	2.108.199.782.497,00	67,97	1.961.927.116.116,00
Pendapatan Retribusi Daerah -LRA	1.a.1).b)	329.920.530.967,00	155.490.820.088,00	47,13	113.129.542.274,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LRA	1.a.1).c)	23.906.630.000,00	15.934.174.811,00	66,65	17.677.645.359,53
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	1.a.1).d)	296.348.944.071,00	163.157.955.272,50	55,06	137.820.191.997,32
Pendapatan Transfer - LRA	1.a.2)	3.438.672.839.543,00	3.260.957.621.792,00	94,83	3.150.952.726.119,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	1.a.2).a)	2.507.761.595.590,00	2.482.957.621.792,00	99,01	2.092.558.622.879,00
Dana Perimbangan	1.a.2).a)	2.507.761.595.590,00	2.482.957.621.792,00	99,01	2.081.057.959.879,00
Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	1.a.2).a).(1)	238.804.481.590,00	231.740.767.929,00	97,04	235.313.166.305,00
Dana Alokasi Umum - LRA	1.a.2).a).(2)	1.678.680.488.000,00	1.678.680.488.000,00	100,00	1.499.537.015.294,00
Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA	1.a.2).a).(3)	40.670.530.000,00	38.650.129.380,00	95,03	33.107.210.141,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA		549.606.096.000,00	533.886.236.483,00	97,14	313.100.568.139,00
Dana Insentif Daerah	1.a.2).a).(4)	00,00	0,00	0,00	11.500.663.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	1.a.2).b)	930.911.243.953,00	778.000.000.000,00	83,57	1.058.394.103.240,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	1.a.2).b).(1)	890.911.243.953,00	738.000.000.000,00	82,84	912.619.667.280,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi - LRA	1.a.2).b).(2)	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	145.774.435.960,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	1.a.3)	105.852.176.078,00	98.840.124.289,00	93,38	67.833.364.857,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		105.852.176.078,00	98.840.124.289,00	93,38	67.833.364.857,00
Belanja	1.b	7.844.702.182.572,00	6.282.441.543.317,28	80,09	6.047.219.172.842,00
Belanja Operasi	1.b.1)	5.422.658.985.633,00	4.788.957.849.977,28	88,31	4.411.464.936.830,00
Belanja Pegawai	1.b.1).a)	2.038.507.227.859,00	1.854.598.838.131,00	90,98	1.859.029.655.901,00
Belanja Barang dan Jasa	1.b.1).b)	3.004.309.316.194,00	2.571.197.143.166,28	85,58	2.358.927.781.710,00
Belanja Hibah	1.b.1).c)	295.652.654.880,00	290.823.938.445,00	98,37	136.605.348.219,00



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/05/01/2023

Kepada Yth. Medan, 05/01/2023
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Viona Asmara
NPM : 1905170078
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Penyerahan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama mengalami keterlambatan.

Rencana Judul : 1. PERAN PERANGKAT DESA PADA AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
2. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Analisis Alokasi Dana Desa
3. Analisis Kinerja Organisasi Pemerintahan Dalam Memberikan Pelayanan Publik

Objek/Lokasi Penelitian: Kantor Camat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Viona Asmara)


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

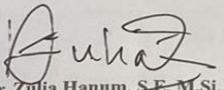
Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/05/01/2023

Nama Mahasiswa	: Viona Astnara
NPM	: 1905170078
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul	: 05/01/2023
Nama Dosen pembimbing ^{*)}	: Rezky Zuriah, SE., M.Si (13 Januari 2023)

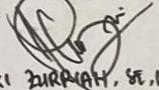
Judul Disetujui^{**)} : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN
METODE VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH
KOTA MEDAN PERIODE 2019 - 2023

Medan, 3 Oktober 2023

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Dosen Pembimbing


(REZKY ZURIAH, SE, M.Si)

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
seolah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
2 dari 2 halaman

Halaman ke



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 2583/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 03 Oktober 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Viona Asmara
 N P M : 1905170078
 Semester : XI (Sebelas)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value For Money Pada Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023

Dosen Pembimbing : **Rezki Zurriah, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **09 Oktober 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1446 H
 09 Oktober 2024 M

Dekan

Dr. H. Janur L. SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Viona Asmara
NPM : 1905170078
Dosen Pembimbing : Rezki Zurriah, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value For Money* pada Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Format penulisan disesuaikan dgn pedoman - Latar belakang diperbaiki, data/masalah penelitian di tambahkan - Rumusan, batasan masalah di sesuaikan	} 4 Okt '24 6 Nov '24	
Bab 2	- Teori nya disesuaikan - Kerangka berpikir di sesuaikan lagi - Penelitian terdahulu di tambahkan (surreal)	4 Okt '24 } 6 Nov '24	
Bab 3	- Sesuaikan jenis penelitian - Perluasan operasional di perbaiki - Tabel waktu penelitian di sesuaikan	6 Nov '24 11 Nov '24 15 Nov '24	
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka pakai mendelay - Daftar pustaka disesuaikan	4 Okt '24 11 Nov '24	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Teknik analisis data dikoreksi - Teknik pengumpulan data disesuaikan	} 6 Nov '24	
Persetujuan Seminar Proposal	Bimbingan Proposal T. Akhir selesai, ACC!!!	2 des '24	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, Desemberr 2024
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Rezki Zurriah, S.E., M.Si.)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 19 Desember 2024* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Viona Asmara*
NPM. : *1905170078*
Tempat / Tgl.Lahir : *Galang, 07 Agustus 2000*
Alamat Rumah : *Jl.P.Kemerdekaan Lk.IV*
Judul-Proposal : *Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value For Money Pada Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>latar belakang masalah, berkaitan disesuai kan variabelnya</i>
Bab II	<i>teori ditambahkan</i>
Bab III	<i>disesuaikan</i>
Lainnya	<i>aspeknya penulisan sesuai buku pedoman sifat 7 jurnal. Ditua. Aet. UMSU</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 19 Desember 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Rezki Zurriah, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak., CA



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
 Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor :000.9/2671

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 2583/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 09 Oktober 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan.
NAMA	: Viona Asmara
NIM	: 1905170078
JURUSAN	: Akuntansi
JUDUL	: "Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value ForMoney Pada Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023"
LOKASI	: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
LAMANYA	: 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. **Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).**
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
 Pada Tanggal :25 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Badan
 Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S, Sos, M. AP
 Pembina Tk. I (M/b)
 NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos-20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228, Website : pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 10 /B.AP/BKAD/I/2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama : VIONA ASMARA
NIM : 1905170078
Universitas/Fakultas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA / EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan/Prog.Studi : AKUNTANSI/ S-I

Telah selesai melaksanakan Riset, dengan judul "Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023", di **Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan** pada **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan** dari tanggal 12 November 2024 s.d tanggal 13 Januari 2025.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Desember 2025

a.n. **Kepala BKAD Kota Medan**
Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



Muhammad Sayuti Harahap, S.E., M.M.
Penata Tk. I
NIP 198309252011011011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

1. Nama : Viona Asmara
NPM : 1905170078
Tempat/ Tanggal Lahir : Galang, 07 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. P. Kemerdekaan Lk. IV Galang Kota
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Email : vionaasmara45@gmail.com
HP : 0813-6920-8973
2. Nama Orang Tua
Ayah : Yan Asmara
Ibu : Evi Susianti
3. Jenjang Pendidikan
 - SD Negeri 101912 Pagar Merbau Tahun 2012
 - SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Tahun 2015
 - SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Tahun 2018
 - Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2025 sampai sekarang.

Medan, Februari 2025

Hormat Saya


Viona Asmara